

# PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PRIVATISASI PERUSAHAAN DAERAH

(Studi Deskriptif Tentang Peran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Dalam  
Pembuatan Kebijakan Privatisasi Perusahaan Daerah Serta Dalam  
Pengelolaan Perusahaan Daerah Setelah Dprivatisasi)

## SKRIPSI



Oleh :

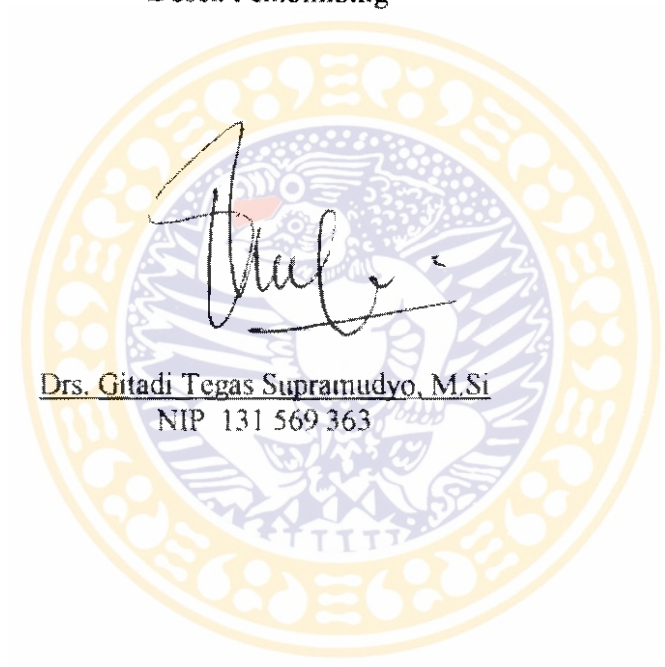
**Yosi Iskandar**  
079414487

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
SEMESTER GASAL 2000/2001**

## Halaman Persetujuan

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan  
Surabaya, 22 Desember 2000

Dosen Pembimbing



Drs. Gitadi Tegas Supramudyo, M.Si  
NIP 131 569 363

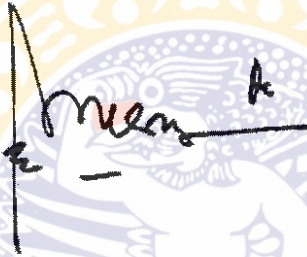
## Halaman Pengesahan

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Jum'at Pahing  
Tanggal : 22 Desember 2000  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang 110

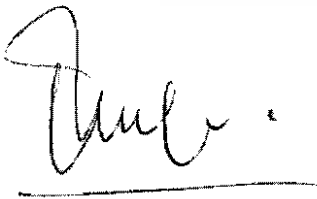
Panitia Penguji terdiri dari :

Ketua,



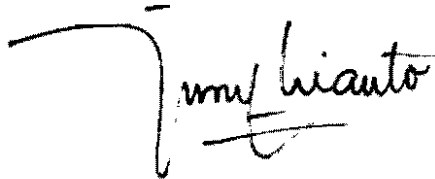
Drs. Roestoto Hartoyo Poetro SU  
NIP: 130 783 545

Anggota,



Drs. Gitadi Tegas Supramudyo M.Si  
NIP: 131 569 363

Anggota,



Drs. Jusuf Irianto M.Com  
NIP: 132 048 915

## Abstrak

Sebagai respon atas kelemahan Pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) dalam beberapa tahun operasionalnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berupaya merevitalisasi kelima PD yang dimiliki melalui Privatisasi yang dilakukan dengan menggabungkannya menjadi satu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bernama PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur (PWUJ). Penelitian ini memfokuskan pada peran Pemda Provinsi Jatim dalam membuat kebijaksanaan Privatisasi PD serta dalam pengelolaan PD setelah diprivatisasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh kontradiksi antara esensi privatisasi dan peran hakiki PD bagi perekonomian daerah. Privatisasi mengisyaratkan Pemda untuk membuka peluang pada swasta untuk ikut serta dalam kepemilikan dan pengelolaan PD serta melepaskan segala bentuk intervensi kepentingan yang secara ekonomis tidak efisien dan produktif dalam menunjang privatisasi PD, namun disisi lain, PD tetap merupakan aset daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepemilikan dan pengelolaannya kepada rakyat mengingat PD selain memiliki peran internal sebagai institusi pemupuk laba, juga memiliki peran eksternal bagi perekonomian daerah yaitu sebagai kontributor PAD dan dinamisator perekonomian daerah. Hal ini menuntut adanya peran sinergis antara Pemda, DPRD dan stakeholders untuk mengonstruksikan kebijaksanaan privatisasi dalam bentuk yang kondusif bagi terciptanya privatisasi tanpa harus meninggalkan perannya bagi perekonomian daerah, demikian halnya dengan pengelolaan PD setelah diprivatisasi yang mengindikasikan perlunya peran Pemda yang proporsional dan profesional untuk mendukung reformasi pola pengelolaan BUMD tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertipe deskriptif yang dilakukan di Biro Bina Perekonomian Daerah Provinsi Jatim, DPRD Provinsi Jatim dan di PT.PWUJ. Teknik pemilihan informan dilakukan secara logical purposive dengan prosedur snowball, data yang dikumpulkan untuk memperkuat analisis dan interpretasi adalah data primer dan sekunder. Reduksi data, penyajian data dan verifikasi dilakukan sebagai teknik analisis data, sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber data. Pada bagian akhir penelitian ini berkesimpulan bahwa; secara umum, peran Pemda baik dalam pembuatan maupun dalam pengelolaan PD setelah diprivatisasi menunjukkan peran yang proporsional dan kondusif bagi tercapainya perbaikan pola pengelolaan PD; dalam proses pembuatan kebijaksanaan Privatisasi, Pemda menunjukkan peran yang signifikan bagi terwujudnya kebijaksanaan privatisasi yang baik dalam arti kebijaksanaan itu layak dilaksanakan (implementable) dan berorientasi pada masa depan (futuristic) melalui proses pembuatan kebijaksanaan dengan pendekatan yang rasional dan komprehensif sehingga mampu meminimalkan biaya sosial dan ekonomi yang dibutuhkan; kebijaksanaan Privatisasi PD Jatim dirumuskan dalam wujud yang paling esensial yaitu merupakan upaya transformasi pengelolaan PD kearah yang lebih mandiri dan profesional tanpa harus mematikan peran hakikinya sebagai BUMD; dalam pengelolaan PD pasca privatisasi Pemda menunjukkan perannya yang konsekwen dengan berubahnya bentuk hukum PD menjadi Perseroan Terbatas; peran Pemda yang konsekwen dan konsisten dalam pengelolaan PD setelah diprivatisasi mengindikasikan terserapnya pola-pola entrepreneurial government pada aparatur-aparatur Pemda yang menangani pemberdayaan perekonomian daerah.